



Adhi Putranto, SE,MM
Analis Kebijakan Ahli Madya
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah

TIM RB TEMATIK INFLASI DAERAH:

Adhi Putranto, Analis Kebijakan Ahli Mady (Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah)

M. Zulhamdani, Analis Kebijakan Ahli Muda (Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah)

Dhani Saptia Hudaya, Analis Kebijakan Ahli Muda (Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah)

Syarif Budiman, Perencana Ahli Muda (Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah)

Pihri, Peneliti Muda (PR Ekonomi Makro dan Keuangan)

Yani Mulyaningsih, Peneliti Madya (PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler)

METODOLOGI :

- Mengkaji Paraktik Baik pada 3 Provinsi terbaik dari 10 provinsi pengendali inflasi terbaik (Kemendagri, february 2024).
- *Descriptif analysis* dengan melakukan studi literatur dan *indepth interview*.

BI : Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

BPS:Inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang

Tabel 1 IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month (m-to-m)*, *Year to Date (y-to-d)*, dan *Year on Year (y-on-y)* Gabungan 90 Kota Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Desember 2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi <i>m-to-m</i> Desember 2023 ¹ (%)	Tingkat Inflasi <i>y-to-d</i> Desember 2023 ² (%)	Tingkat Inflasi <i>y-on-y</i> Desember 2023 ³ (%)	Andil Inflasi <i>m-to-m</i> Desember 2023 (%)	Andil Inflasi <i>y-on-y</i> Desember 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	113,59	116,56	0,41	2,61	2,61	0,41	2,61
Makanan, Minuman, dan Tembakau	117,82	125,10	1,07	6,18	6,18	0,29	1,60
Pakaian dan Alas Kaki	108,48	109,33	0,18	0,78	0,78	0,01	0,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	107,54	108,08	0,01	0,50	0,50	0,00	0,10
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	113,90	115,69	0,10	1,57	1,57	0,01	0,09
Kesehatan	112,75	114,94	0,04	1,94	1,94	0,00	0,05
Transportasi	120,61	122,14	0,45	1,27	1,27	0,06	0,17
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,64	99,84	0,07	0,20	0,20	0,00	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	108,26	110,09	0,54	1,69	1,69	0,01	0,04
Pendidikan	112,45	114,67	0,00	1,97	1,97	0,00	0,11
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	115,44	117,83	0,03	2,07	2,07	0,00	0,18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	120,72	125,01	0,46	3,55	3,55	0,03	0,22

Catatan: ¹ Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK November 2023
² Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022
³ Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022.

sumber : BPS,2023

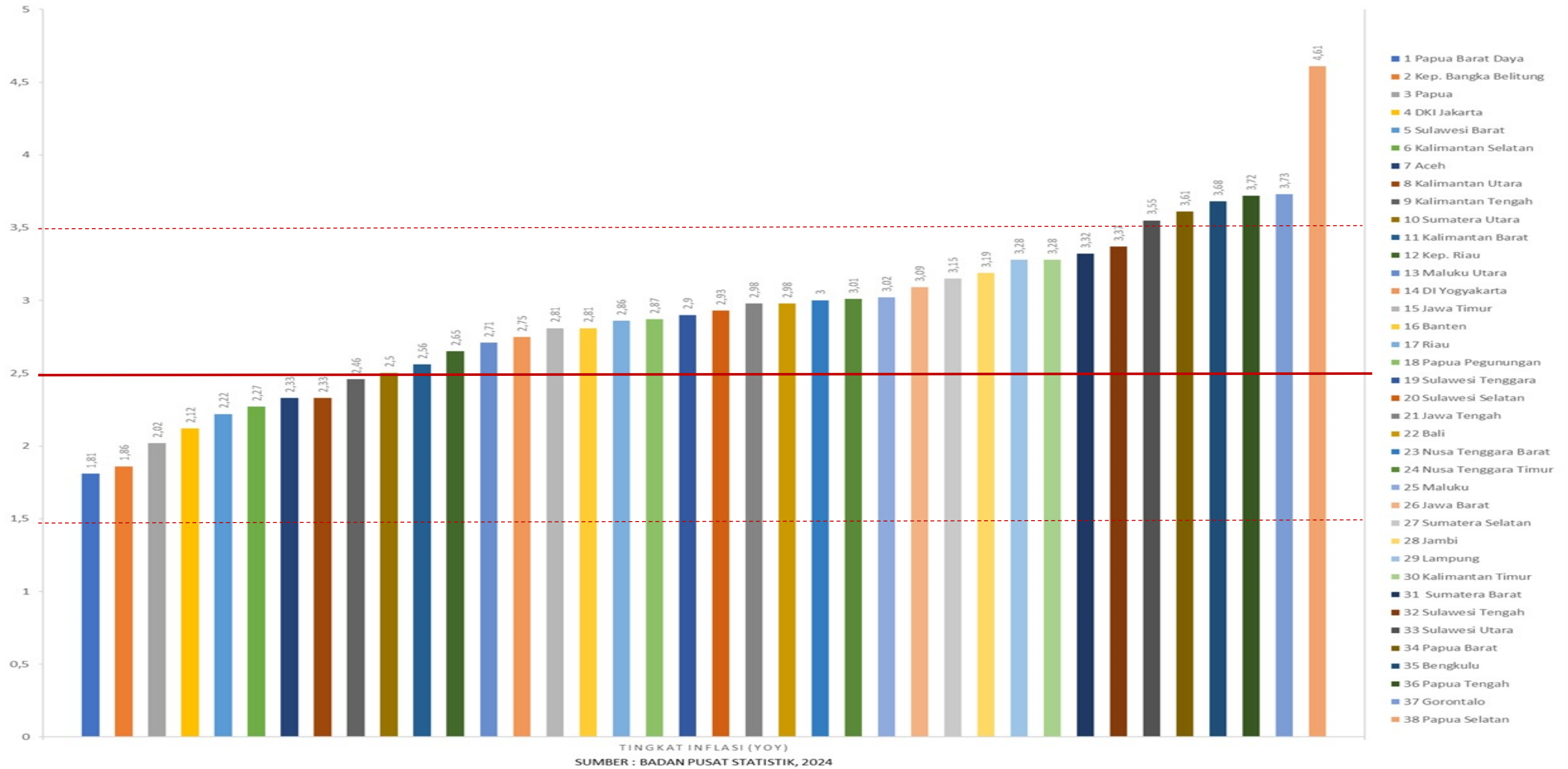
ARAHAN PRESIDEN RI, 2023

1. Memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui:
 - I. intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras
 - II. penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya
2. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian
3. Mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antardaerah
4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa
5. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi



sumber: bahan presentasi TPID Provinsi Kalimantan Selatan,2024

TINGKAT INFLASI YEAR ON YEAR (YOY) PROVINSI DI INDONESIA (PER FEBRUARI 2024)

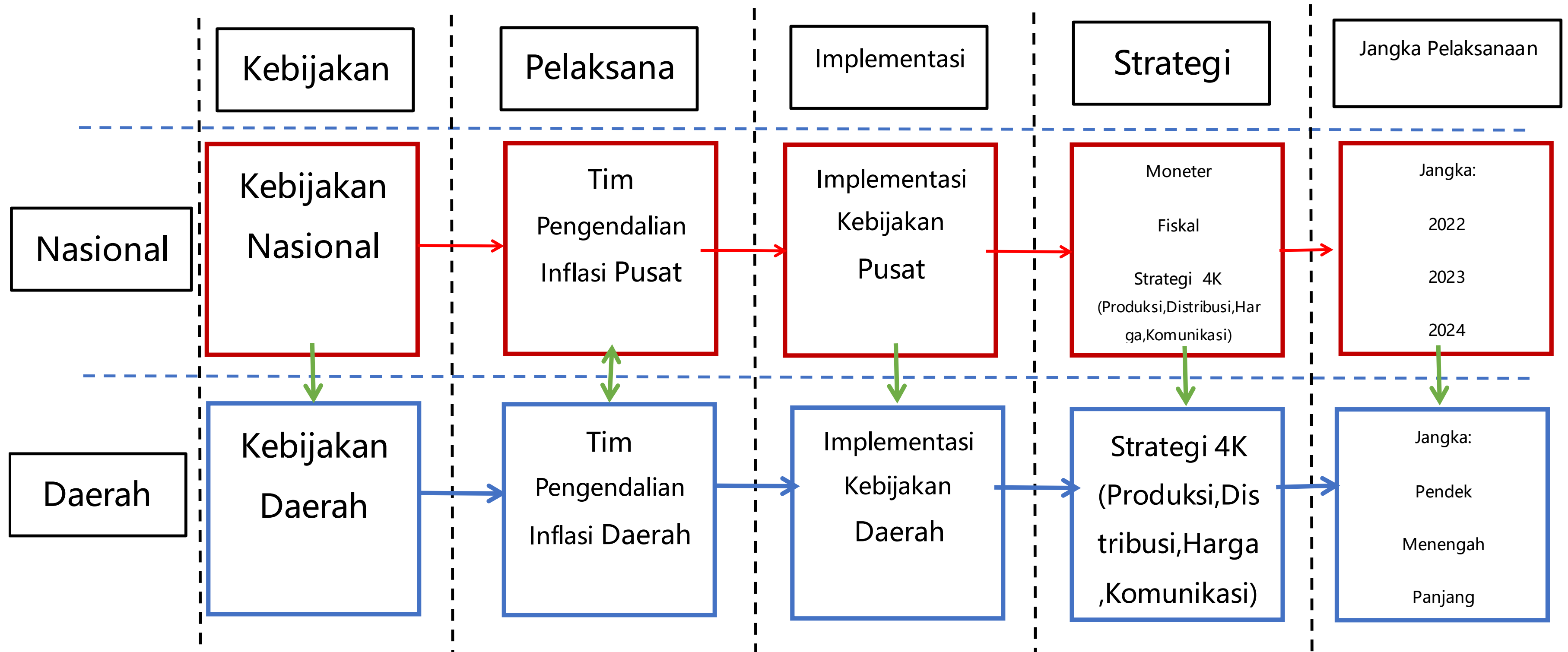


Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2021 tentang sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024, menyatakan tahun 2024 tingkat dan periode sasaran inflasi IHK ditetapkan sebesar: 2,5% dengan deviasi sebesar 1,0%.

Matriks Hasil Pengumpulan Data Kajian Model Pengendalian Inflasi Daerah

Provinsi	Kalimantan Selatan	Aceh	Sulawesi Barat
Waktu	15 - 18 Mei 2024	5 - 8 Juni 2024	9 - 12 Juni 2024
Tim	Adhi Putranto & Dhani Saptia Hudaya	Adhi Putranto, Pihri dan Syarif Budiman	M.Zulhamdani, Dhani Saptia Hudaya dan Yani Mulayaningsih
Koordinasi	TPID, Biro Perekonomian, BRIDA, Disdag	TPID, Perwakilan BI, BPS, Bappeda, Distanbun, Disperindag, Dishub, Dispang, Disnak, Dis ESDM, Bulog, Distrans	TPID, Perwakilan BI, BPS, Bapperida, Disketapang, disperindag
Komoditas Penyumbang Inflasi	Beras, Bawang Merah, Cabe, dan Ikan gabus	Bawang Merah, Cabe dan Rokok (Sigaret Kretek Mesin (SKM))	Ikan tangkap, Bawang Merah, Cabe
Penyebab Inflasi	Momentum keagamaan, Kondisi tanah gambut, banjir, iklim dan cuaca	Momentum keagamaan + politik, kurangnya komidas pangan di aceh.	migrasi ikan, bencana alam longsor, tingginya gelombang laut
Hal signifikan lain yang perlu diperhatikan	tidak ada data rantai pasok, tidak ada pasar induk, kapasitas <i>cold storage</i> kurang, ada tengkulak.	Produksi komoditas bawang merah dan cabe tidak dipenuhi dari dalam Aceh, Komoditas padi dijual ke luar Aceh dalam bentuk gabah, Peternakan hanya menjadi <i>second income</i> . Kurangnya pengendalian konsumsi tembakau	konektivitas antar daerah didominasi oleh akses darat, akses laut belum diutamakan, tidak ada <i>cold storage</i> .
Tindakan TPID	4K, Operasi Pasar dengan (BTT) + Program integrasi Sawit-Sapi dan Padi Apung	4K dan operasi pasar. Disperindag: pasar murah. Distanbun: pasar tani. Dishub: subsidi biaya angkutan barang/jasa	4K, Gerakan Pangan Murah, Digital Farming, Gerakan tanam sejuta cabai dan Fasilitasi Distribusi Pangan
Rencana	Pusat Logistik Kalimantan, penambahan <i>cold storage</i> , dan perbaikan data dan kajian rantai pasok	Food Station Aceh. Pengembangan pertanian/peternakan/perikanan di Aceh untuk pasar aceh	Penyediaan <i>cold storage</i> , Pengembangan Pertanian dan perikanan untuk Pasar di Provinsi Sulbar, memanfaatkan jalur perdagangan di Kep. Balabalagan, jadi akses penyangga IKN,
Output	Model Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (M1)	Model Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Aceh (M2)	Model Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat (M3)

MODEL KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI PUSAT DAN DAERAH



Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri atas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota

Tim Pengendalian Inflasi Pusat pasal 3, maka Ketua adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dibantu Wakil I: Gubernur BI, Wakil II: Menteri Keuangan dan Wakil III: Menteri Dalam Negeri dengan anggota: Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Sekretaris Kabinet dan Kepala Kepolisian Negara RI.

TUGAS DAN FUNGSI BRIDA/BAPPERIDA

Pasal 67-68 Perpres No.78 Tahun 2021, Pasal 5 dan Pasal 6 huruf h Permendagri No.7 Tahun 2023

Tugas

Pasal 67 Perpres 78/2021

BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan **penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah** sebagai **landasan dalam perencanaan pembangunan daerah** di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Fungsi

Pasal 68 Perpres 78/2021

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

- a) **pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah** yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila
- b) **penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah** yang berpedoman pada nilai Pancasila
- c) **koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan** di bidang riset dan inovasi, **kerja sama** pembangunan iptek, serta **kemitraan** litbangjirap serta invensi dan inovasi di daerah;
- d) **pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang riset dan inovasi, **kerja sama** pembangunan iptek, serta **kemitraan** litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah
- e) **pemantauan dan evaluasi** litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah
- f) **pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi iptek** di daerah
- g) **koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** berbasis litbangjirap iptek yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah dan
- h) **koordinasi sistem iptek daerah**

PERAN BRIDA/BAPPERIDA

BRIDA/BAPPERIDA MEMILIKI 3 PERAN PENTING

PerBRIN no.5 tahun

2

Menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah

RIPJ PID memuat **Substansi:**

1. Penyusunan **kajian** untuk menghasilkan rekomendasi **kebijakan berbasis bukti**
2. Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk **Pengembangan Produk Unggulan Daerah**
3. Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk **Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah**

1

Memperkuat Perencanaan Pembangunan Daerah

- RPJPD 2025-2045
- RPJMD 2025-2029
- RKPD 2025

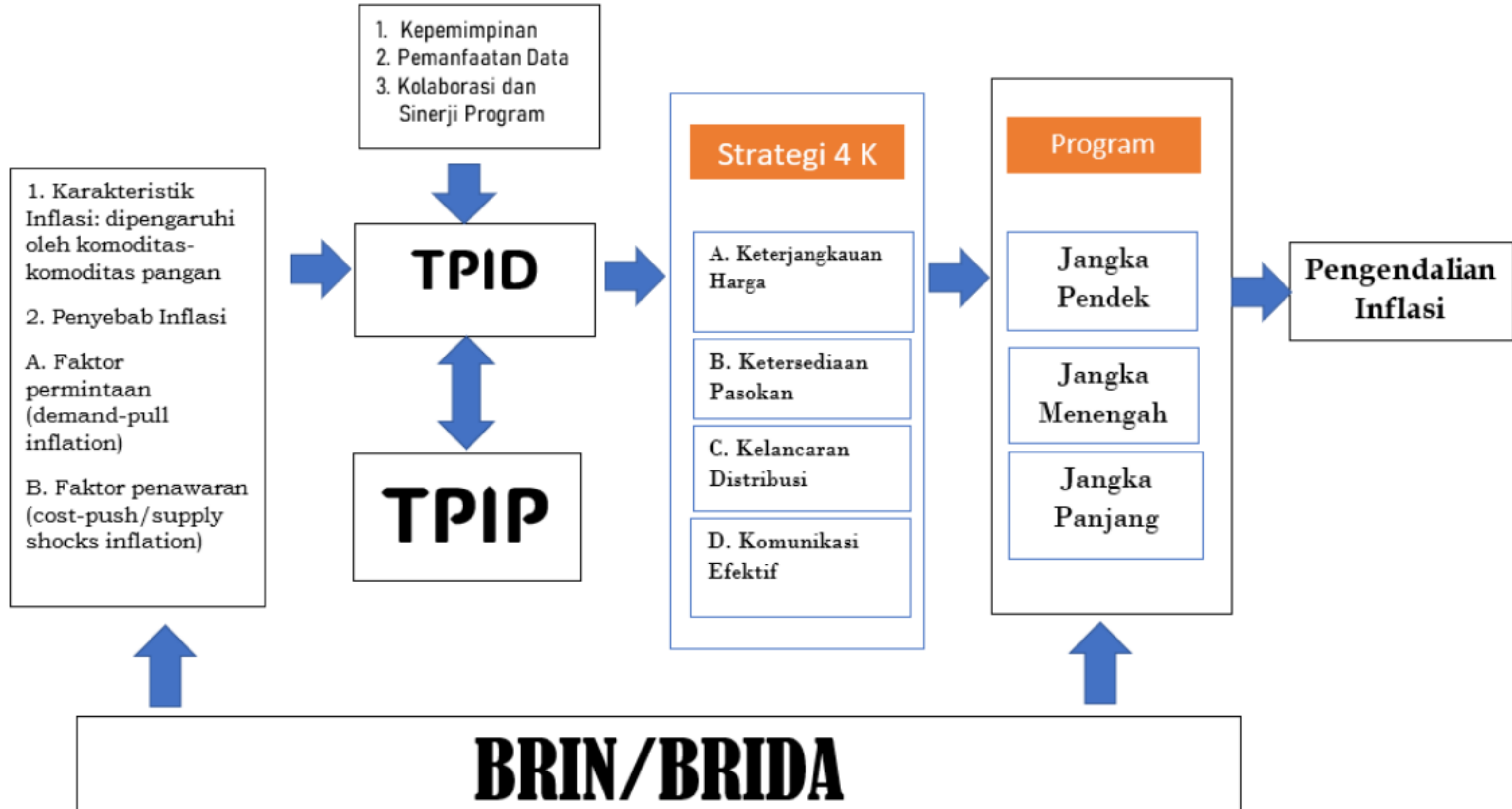
3

Menjadi Orkestrator

Orkestrasi pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah



MODEL KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI PUSAT DAN DAERAH didukung Risnov



MODEL KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI BERDASARKAN PRAKTIK TERBAIK PADA 4K

STRATEGI (4K)	JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG	
	Program	Leading Sectors	Program	Leading Sectors	Program	Leading Sectors
KETERSEDIAAN PASOKAN	Komitmen Pimpinan Daerah/Leadership	Gubernur/ Bupati/ Walikota DPRD	Komitmen Pimpinan daerah/Leadership	Gubernur/ Bupati/ Walikota DPRD	Komitmen Pimpinan Daerah/Leadership	Gubernur/ Bupati/ Walikota DPRD
	Kerja sama antar daerah		Kreativitas kebijakan pimpinan kepala daerah dalam penyediaan produksi		Sinergi dan kerjasama program dengan berbagai pemangku kepentingan	
	Sinergi dan kerjasama program dengan berbagai pemangku kepentingan	Dinas Pertanian	Sinergi dan kerjasama program dengan berbagai pemangku kepentingan	Dinas Komunikasi dan informasi	Kapasitas penyimpanan produksi/lumbung/cold storage	Dinas Perdagangan Dinas Perindustrian
	Gerakan menanam	Dinas Komunikasi dan Informasi	Membangun Sistem informasi neraca pangan	Dinas Komunikasi dan informasi	Hilirisasi komoditas di dalam provinsi	Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan
	Basis data neraca pangan /rantai pasok pangan	Dinas Perindustrian	Sistem informasi penyimpanan produksi/lumbung/cold storage	Dinas Perindustrian	Pengembangan produksi bahan pangan lokal	Dinas Komunikasi dan informasi
	intervensi pasar	Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan	Pengembangan Sistem Informasi Rantai Pasok Pangan	
	Satgas Pangan	Dinas Ketahanan Pangan			Pengembangan Ekosistem rantai pasok pangan	BRIDA/Bapperida
	Kajian neraca pangan pangan penyumbang inflasi	BRIDA/BAPPERIDA	Perluasan adopsi teknologi (IOT) dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM pangan.	Dinas Pertanian		
	Kajian Peningkatan Ketersediaan Pasokan Pangan Penyumbang Inflasi		Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian	Dinas Ketahanan Pangan		
			Inovasi penyediaan komoditas pangan penyebab inflasi di dalam provinsi	BRIDA/BAPPERIDA		



MODEL KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI BERDASARKAN PRAKTIK TERBAIK PADA 4K

STRATEGI (4K)	JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG	
	Program	Leading Sectors	Program	Leading Sectors	Program	Leading Sectors
KETERJANGKAUAN HARGA	Leadership	Kepala Daerah	Leadership	Kepala Daerah	Leadership	Kepala Daerah
	Sidak Pasar	Dinas	Kreativitas	DPRD	Penurunan Kemiskinan	DPRD
	Pemantauan Harga	Perdagangan	kebijakan pimpinan kepala daerah dalam penyediaan produksi		Peningkatan daya beli	
	Bansos	Dinas Pangan			Penurunan Pengangguran	Seluruh OPD
	Intervensi Pasar		Sinergi dan kerjasama program dengan berbagai pemangku kepentingan	Dinas Komunikasi dan informasi	Peningkatan PDRB, PAD	
	Satgas Pangan	Sekretaris Daerah				
	Penggunaan BTT dan Dana Desa					
	Peningkan Kapasitas SDM untuk pengolahan data	Dinas Komunikasi dan informasi	Sistem informasi pasar komoditas penyebab inflasi	Dinas Perdagangan	Mengkaji Pengendalian Inflasi dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	BRIDA/Bapperida
	Peningkatan kualitas data			Dinas Ketahanan Pangan		
	SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok)					
Panel BAPANAS						
Kajian Optimalisasi pemanfaatan APBD untuk Keterjangkauan Harga	BRIDA/BAPPERIDA	Mengkaji Ekosistem Pasar Komoditas Penyebab Inflasi	BRIDA/Bapperida			



MODEL KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI BERDASARKAN PRAKTIK TERBAIK PADA 4K

STRATEGI (4K)	JANGKA PENDEK		JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG	
	Program	Leading Sectors	Program	Leading Sectors	Program	Leading Sectors
KELANCARAN DISTRIBUSI	<p>Leadership</p> <p>Subsidi angkutan komoditas pangan penyebab inflasi</p> <p>Basis data distribusi</p> <p>Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD)</p> <p>Kajian Ekosistem Rantai Pasok pangan penyumbang inflasi</p>	<p>Kepala Daerah</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Komunikasi dan informasi</p> <p>Dinas Perdagangan</p> <p>BRIDA/BAPPERIDA</p>	<p>Leadership</p> <p>Sistem informasi distribusi pangan penyebab inflasi</p> <p>Sistem transportasi murah untuk komoditas penyebab inflasi</p> <p>Tol laut</p> <p>Pembangunan Infrastruktur</p> <p>Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui: Fasilitasi UMKM pangan binaan dengan e-commerce di level nasional maupun daerah, dan Peningkatan volume transaksi PasTani</p>	<p>Kepala Daerah</p> <p>Dinas Komunikasi dan informasi</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi</p> <p>Dinas Pertanian</p> <p>BRIDA/BAPPERIDA</p>	<p>Leadership</p> <p>Pembangunan Pusat - pusat distribusi</p> <p>Digilisasi UMKM Pangan</p> <p>Mengkaji pusat-pusat distribusi</p>	<p>Kepala Daerah</p> <p>Dinas Perdagangan</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Komunikasi dan informasi</p> <p>BRIDA/BAPPERIDA</p>
KOMUNIKASI EFEKTIF	<p>Leadership</p> <p>Komunikasi antar internal Pemda, antar <i>stakeholder</i>, antar daerah di dalam dan luar provinsi</p> <p>Komunikasi publik</p> <p>Advokasi BPS dalam rangka perbaikan data</p> <p>Kajian Komunikasi Efektif pengendalian Inflasi</p>	<p>Kepspls Daerah</p> <p>Dinas Komunikasi dan informasi</p> <p>BRIDA/BAPPERIDA</p>	<p>Leadership</p> <p>Sistem informasi dan komunikasi komoditas pangan penyumbang inflasi</p> <p>Kreativitas dan inovasi kebijakan</p> <p>Sinergi dan kerjasama program dengan berbagai pemangku kepentingan</p>	<p>Kepala Daerah</p> <p>Dinas Komunikasi dan informasi</p> <p>BRIDA/BAPPERIDA</p>	<p>Leadership</p> <p>Penyempurnaan Sistem informasi dan komunikasi komoditas pangan penyumbang inflasi</p>	<p>Kepala Daerah</p> <p>Dinas Komunikasi dan informasi</p> <p>BRIDA/BAPPERIDA</p>

- a) Pengendalian inflasi di daerah harus sinkron dengan strategi dan program strategis Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- b) Strategi pengendalian inflasi di daerah harus berbasis data dan tidak hanya berjangka pendek tetapi juga memiliki jangka menengah dan panjang serta melibatkan OPD/stakeholders terkait
- c) Pemerintah Daerah harus melakukan Kerjasama Antar Daerah untuk dapat memenuhi ketersediaan pasokan.
- d) Kepala Daerah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)/Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), untuk:
 - i. Menjadi anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
 - ii. Melakukan kajian berbasis data sebagai *evidence based policy* terkait 4K: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
ex.riset : pengembangan teknologi pertanian dan industri, kebijakan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur dan sistem logistik, adopsi teknologi dan tentang ketahanan sosial dan ekonomi.



TERIMA KASIH